



**UPAYA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA  
PADANG LUAR NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S-1)  
Jurusan Manajemen Bisnis Syariah*

**Oleh :**

**Aini Hidayah**  
**NIM. 1730404006**

**JURUSAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aini Hidayah  
NIM : 1730404006  
Jurusan : ManajemenBisnis Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“UPAYA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PADANG LUAR NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 26 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



**Aini Hidayah**  
**NIM 1730404006**

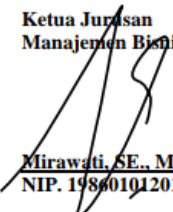
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Aini Hidayah**, NIM: **1730404006**, dengan judul: **“UPAYA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PADANG LUAR NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN”**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 28 Juni 2021

Ketua Jurusan  
Manajemen Bisnis Syariah

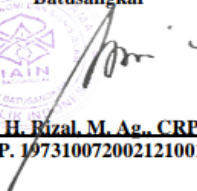
  
Mirawati, SE., MA.Ek  
NIP. 19860101201532004

Pembimbing

  
Elsa Fitri Amran, M.Si  
NIP.198706202019032009


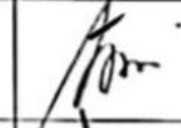

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



  
Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP®  
NIP. 197310072002121001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Aini Hidayah, NIM. 1730404006, dengan judul "Upaya Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Padang Luar Ngari III Koto Kecamatan Rambatan" telah di ujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) jurusan Manajemen Bisnis Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elsa Fitri Amran, M.Si	Ketua/ Pebimbing		12/8/2021
2	Dr. H. Rizal, M.Ag.CRP®	Anggota/ Penguji I		6/8/ 2021
3	Rahmat Firdaus, M.E.Sy	Anggota/ Penguji II		5/8/2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar



Dr/H. Rizal, M. Ag.CRP®

XIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**Aini Hidayah, Nim 1730404006 (2021), Judul Skripsi: “Upaya Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Padang Luar Ngari III Koto Kecamatan Rambatan”.** Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya peningkatan dalam perekonomian masyarakat Desa Padang Luar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya apa saja yang telah PNPM Mandiri lakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Padang Luar. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau pengambilan data yang dilakukan pada suatu lokasi. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti akan merangkum, diklasifikasi sesuai aspek masalah yang telah disusun, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dapat disimpulkan upaya yang telah PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Padang Luar terdiri dari: 1). Upaya peningkatan pembangunan sarana/prasarana desa yaitunya dengan membangun pasar Bungo Ladan. Dengan adanya pembangunan pasar Bungo Ladan dapat membantu masyarakat yang berjualan dan membantu masyarakat membeli bahan masakan dengan lengkap, 2). Upaya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan yaitunya dengan pengadaan alat posyandu yang berguna bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan dan alat-alat belajar sekolah TK yang berguna bagi proses belajar mengajar disekolah TK tersebut dan 3). Upaya peningkatan keterampilan kelompok usaha dalam meningkatkan perekonomian, keterampilan kelompok usaha ini tidak ada dilakukan di PNPM Mandiri 4). Upaya penyaluran dana bergulir untuk masyarakat yang penyalurannya melalui SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Desa Padang Luar, penyaluran dana ini diharapkan bisa menghapus rentenir di masyarakat dan bantuan dana bergulir ini membantu masyarakat dalam modal usaha.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	9
E. Defini Operasional.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Ekonomi .....	11
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	11
3. Kemiskinan.....	23
4. Pembangunan .....	25
5. Ekonomi Islam.....	28
6. PNPM Mandiri .....	35
B. Penelitian yang Relevan .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	44
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Teknik Keabsahan Data .....	47

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan .....	48
B. Narasumber.....	52
C. Hasil Penelitian.....	53
D. Pembahasan .....	65

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi .....	68
C. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Provinsi Sumatra Barat .....	2
Tabel 1.2 Data Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar.....	3
Tabel 1.3 Data Pinjaman Masyarakat .....	7
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo PNPM Mandiri.....	50
Gambar 4.2 Pasar Bungo Ladan.....	53
Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Alfajri.....	54
Gambar 4.4 Wawancara dengan Ibu Bainar .....	55
Gambar 4.5 Wawancara dengan Ibu Eri .....	56
Gambar 4.6 Alat-alat Belajar TK .....	57
Gambar 4.7 Alat-alat bermain Tk .....	57
Gambar 4.8 Wawancara dengan Ibu Perawati .....	58
Gambar 4.9 Wawancara dengan Ibu Guru TK.....	59
Gambar 4.10 Posyandu .....	59
Gambar 4.11 Wawancara dengan Ibu Rena.....	60
Gambar 4.12 Wawancara dengan Bapak Nofrial.....	61
Gambar 4.13 Wawancara dengan Ibu Nin .....	61
Gambar 4.14 Wawancara dengan Ibu Baiyanis .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sudah sejak lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi” dalam kehidupan. Pengertian kemiskinan sendiri sebagai suatu konsep ilmiah lahir sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Karena itu di setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse) dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan

mencari nafkah dan kepemilikan aset, sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut memunculkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat.(Eliyati, 2012: 1)

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki banyak berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perdagangan, perikanan, pariwisata, dan lain-lainnya. Akan tetapi pemerataan pembangunan masih belum merata di setiap kabupaten di Sumatera Barat, masih banyak ketimpangan pendapatan yang perlu di perbaiki. (Haris, 2: 2018) Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sejak 2014-2018 sering mengalami fluktuasi, berikut persentase penduduk miskin di Sumatera Barat dari maret 2014-September 2018:

**Tabel 1.1**  
**Badan Pusat Statistik**  
**Data Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat**  
**Periode 2014-2018**

No	Tahun	Bulan		Perubahan
		Maret	September	
1	2014	7,41	6,89	0,52%
2	2015	7,31	6,71	0,6%
3	2016	7,09	7,14	-0,05%
4	2017	6,87	6,75	0,12%
5	2018	6,65	6,55	0,1%

Sumber: BPS (2019)

Dari tabel bisa dilihat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara umum kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Selama lebih dasawarsa ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah dapat ditekan cukup signifikan. Penduduk miskin terhitung pada bulan Maret 2018 sebanyak 6,65% sedangkan pada bulan September 2018 menurun ke 6,55%.

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten yang berada di Sumatera Barat. Secara Administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari dan 395 Jorong. Kabupaten Tanah Datar memiliki jumlah keluarga miskin pada tahun 2016 sebanyak 5,68%. Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan sedikit sehingga pada tahun 2019 angka keluarga miskin di Tanah Datar sebesar 4,66% seperti yang tertera pada tabel dibawah:

**Tabel 1.2**  
**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
**Data Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar**  
**Periode 2016-2019**

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Persentase Perubahan
1	2016	5,68	0
2	2017	5,56	0,12
3	2018	5,32	0,24
4	2019	4,66	0,66

Sumber: Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) (2019)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwasannya Jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan sedikit demi sedikit sehingga pemerintah harus tetap berupaya agar kemiskinan akan dapat mengurangi dari kehidupan masyarakat. Dari tabel 1.3 dilhatkan bahwa kemiskinan dari 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 0,12%, pada tahun 2017-2018 menurun hingga 0,24% dan pada tahun 2018-2019 terjadi penurunan sebesar 0,66%. (RLPPD, 2019: 4)

Dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat *Ar-Ra'd* ayat 11, yaitunya:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

*“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah”.*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya Allah akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum itu mau berusaha, maka jika masyarakat yang ingin merubah kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan dari kehidupan mereka maka berusahalah dan tetap optimis karena Allah telah menjanjikan bagi yang mau berusaha maka akan dirubah keadaannya. Kemiskinan dapat dihapuskan atau di minimalisir jika masyarakat dan pemerintahnya saling bekerja sama dalam menuntas kemiskinan tersebut.

Maka dari itu pemerintah merencanakan berbagai program- program dalam upaya memberdayakan masyarakat salah satunya adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di berbagai daerah yang dirasakan memerlukan program bantuan ini. Sasaran yang perlu diberdayakan adalah masyarakat yang strata sosialnya rendah seperti, kaum buruh, nelayan, petani, orang miskin di kota dan desa. (Murbeng, dkk :1258)

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

(P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan desa tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. (PNPM Mandiri)

Program Nasional Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM- Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri perdesaan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. ( Nathanael, 2013: 73)

Program pemberdayaan ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan yang terbesar karena program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat. Serta program pendampingan Masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan keuangan. (Rochman, 2015: 29)

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) perdesaan di anggap sebagai salah satu pemecah kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) telah di laksanakan dari tahun 2007 begitupun di Kabupaten Tanah Datar yang telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dari tahun 2007 sampai kecamatan yang ada pada kabupaten Tanah Datar juga menggunakan PNPM Mandiri dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya salah satu nya kecamatan Rambatan melalui berbagai program PNPM Mandiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Beberapa program dalam membantu masyarakat telah dilaksanakan oleh PNPM Mandiri kecamatan Rambatan mulai dari pinjaman dana bergulir, pembangunan, kesehatan dan pendidikan.

Bapak Alfajri menyebutkan bahwa Program PNPM Mandiri kecamatan Rambatan yang telah tereliasasikan seperti pinjaman dana bergulir kepada masyarakat, pembangunan jalan (rabat beton), pembangunan polindes, tempat untuk posyandu, irigasi sawah, jembatan gantung, pembukaan jalan baru, dan pemberian beasiswa kepada anak sekolah yang berada di Padang Magek salah satu nagari di kecamatan Rambatan. Salah satu desa yang juga mendapatkan bantuan dari PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan adalah Desa Padang Luar.

Padang Luar adalah desa yang terdiri dari beberapa jorong yang terdapat pada Nagari III Koto Kecamatan Rambatan. Nagari III Koto terdiri dari III Koto yang saling terkait yaitunya Padang Luar, Galogandang dan Turawan. Padang luar sendiri terdiri dari beberapa jorong yaitunya jorong Aur Sarumpun, Siturah, Kalumpang, Pantar, Gantiang, Guguak jambu, Bonai. Salah satu program yang membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa Padang Luar adalah PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dengan memberikan pinjaman bergulir ke masyarakat, pembangunan, kesehatan dan pendidikan.

Nagari III Koto telah menerima bantuan pinjaman dari PNPM Mandiri dari tahun 2007 hingga 2020. Salah satu desa pada Nagari III Koto yang menerima Pinjaman itu adalah Desa Padang Luar. Tidak hanya dari segi pinjaman dana desa Padang Luar juga mendapat bantuan seperti bantuan bangunan untuk posyandu, pembangunan pasar Bungo Ladan salah satu pasar tradisional di Padang Luar, pengadaan alat bermain di TK Bonai salah satu TK yang berada di desa Padang Luar agar lancar nya proses belajar mengajar di TK tersebut. Berikut data pinjaman dana PNPM Mandiri dari Nagari III Koto, yaitu:

**Tabel 1.3**  
**PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan**  
**Data Pinjaman Masyarakat**  
**Periode 2015-2019**

No	Wilayah Usulan/Jorong	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aur Sarumpun	200.000.000	220.000.000	210.000.000	110.000.000	110.000.000
2	Siturah	100.000.000	-	-	-	-
3	Pantar	120.000.000	-	120.000.000	120.000.000	120.000.000
4	Bonai	450.000.000	300.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
5	Kalumpang	310.000.000	460.000.000	500.000.000	210.000.000	210.000.000
6	Guguak Jambu	150.000.000	160.000.000	180.000.000	140.000.000	-
7	Galogandang	670.000.000	630.000.000	1.030.000.000	995.000.000	825.000.000
8	Turawan	150.000.000	-	40.000.000	-	-

Sumber: PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan (2020)

Data diatas merupakan jumlah pinjaman yang telah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dari tahun 2015-2019. Masyarakat meminjam dana ke PNPM Mandiri secara berkelompok yang nantinya akan ada ketua dari kelompok tersebut sebagai perantara dalam penerimaan ataupun pengembalian dana, Kelompok ini disebut sebagai Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Dari data diatas terdapat enam Jorong dari Desa Padang Luar meminjam dana ke PNPM Mandiri yaitunya Aur Sarumpun, Siturah, Pantar, Bonai, Kalumpang, dan Guguak Jambu. Pada tabel di perhatikan peminjaman

dari enam Jorong tersebut mengalami kenaikan dan penurunan peminjaman dana.

Pinjaman dana yang diberikan PNPM Mandiri dilakukan agar perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Namun jika diperhatikan dari yang terlampir pada tabel adanya penurunan pinjaman dari masyarakat memperlihatkan bahwasannya ekonomi masyarakat juga sedang dalam keadaan yang sulit. Sehingga tidak adanya peningkatan ekonomi pada masyarakat seperti yang terlihat dari data pinjaman yang menurunnya pinjaman dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang *“Upaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan”*.

## **B. Fokus dan Sub Fokus**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah upaya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Padang Luar Kecamatan Rambatan.

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana pada Desa Padang Luar?
2. Bagaimana Upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat Padang Luar ?
3. Bagaimana Upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Padang Luar?

4. Bagaimana Upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam penyaluran dana pinjaman kepada Masyarakat Padang Luar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana pada desa Padang Luar
2. Untuk mengetahui Upaya PNPM Mandiri Kecamatan Ramabtan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat Padang Luar
3. Untuk mengetahui Upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Padang Luar
4. Untuk mengetahui Upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam penyaluran dana pinjaman kepada Masyarakat Padang Luar

### **D. Manfaat dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi, sumber informasi dan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya PNPM Mandiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
  - b. Secara praktis penelitian ini dapat sebagai umpan balik PNPM Mandiri jika usaha PNPM Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat berhasil maka program PNPM Mandiri ini bisa berlanjut sampai lama.

## 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambahkan khazanah perpustakaan IAIN Batusangkar.

### **E. Definisi Operasional**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”. Pemberdayaan masyarakat yang penulis maksud disini adalah peningkatan ekonomi di Desa Padang Luar dengan bantuan dari PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan.

PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri yang penulis maksud disini adalah dari segi upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Ekonomi**

###### **a. Pengertian Ekonomi**

Perkataan “ekonomi” dalam bahasa Arab terambil dari kata *iqtishad*, yang berarti keserdahanaan, dan kehematan. Berdasarkan dari kata tersebut berkembang dan meluas sehingga mencakup pengertian *‘ilm al-iqtishad*, yaitu ilmu yang berkaitan atau yang membahas ekonomi. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata ekonomi mengandung pengertian; (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan; (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. (Nainggolan, 2017: 49)

Kata ekonomi pertama kali digunakan Xenophone seorang ahli filsafat Yunani, istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani yaitu: OIKOS dan NOMOS yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga.

Secara lebih luas ilmu ekonomi dikemukakan oleh J.L. Meyyaitu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia kearah kemakmuran. Sedangkan Adam Smith mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. (Dinar&Hasan, 2018: 1-2)

Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-

keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. (Hasoloan, 2010 : 8)

Ilmu ekonomi adalah bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Seperti kita tidak tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak beraneka ragam. Satu kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan ini bertambah dan akan terus berkembang baik jumlah maupun kualitasnya mengikuti kemajuan peradaban manusia. (Dinar&Hasan, 2018: 1) Berkaitan dengan sistem ekonomi, ada tiga bentuk sistem ekonomi yang dikenal di dunia ini, yaitu:

- 1) Sistem ekonomi pasar (*Laissez-Faire Economy*) merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti konsumsi dan produksi. perekonomian akan menentukan titik keseimbangan dengan mengandalkan kemampuan pada sistem harga, yaitu tarik menarik antara permintaan dan penawaran, keseimbangan harga serta jumlah barang dan jasa dalam perekonomian dibimbing oleh sesuatu yang tidak kelihatan (*invisible hand*)
- 2) Sistem ekonomi terpusat (sistem ekonomi sosialis) atau disebut *Command Economy*, yaitu sistem ekonomi dimana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan kata lain, dalam perekonomian dibimbing oleh sesuatu yang tidak kelihatan (*invisible hand*)
- 3) Sistem ekonomi campuran yaitu gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem terpusat. Dalam sistem ekonomi campuran, kebebasan individu dan perusahaan dalam

menentukan kegiatan ekonomi masih diakui, tetapi pemerintah ikut campur dalam perekonomian sebagai stabilisator ekonomi dengan memberlakukan berbagai kebijakan fiskal dan moneter. (Hasoloan, 2010: 10-11)

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal suatu kaidah yang dapat dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Kaidah itu disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah:

- 1) Suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan
- 2) Suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin

Istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisiensi. Efisiensi menunjukkan perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan hasil. Jadi cara kerja yang efisiensi menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan. (Dinar&Hasan, 2018: 5)

Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi bagi seseorang itu berbeda-beda, namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Adapun motif ekonomi lainnya adalah:

- 1) Motif memperoleh keuntungan

Motif ini merupakan dorongan wajar bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam rangka memperbesar usahanya.

2) Motif memperoleh penghargaan

Motif ini merupakan motif agar terpuja dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Untuk itu ia tampil dengan gaya mewah dan senang memberi bantuan agar mendapat pujian/penghargaan dari pihak lain.

3) Motif memperoleh kekuasaan ekonomi

Motif ini merupakan motif ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi, setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang-cabang usahanya di setiap kota, ia tetap berusaha mengembangkan usahanya. Kadang-kadang motif memperoleh penghargaan.

4) Motif sosial/ membantu sesama

Dalam hal ini kegiatan ekonomi seseorang didorong bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan berbuat sosial seperti membantu korban bencana alam, memberi sumbangan pada panti asuhan, yayasan tuna netra dll. (Dinar&Hasan, 2018: 6)

Hukum ekonomi adalah ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi. Artinya, bagaimana hubungan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Ada 2 hubungan peristiwa ekonomi yaitu hubungan sebab akibat dan hubungan saling mempengaruhi.

1) Hubungan Sebab-Akibat (kausal)

Hubungan sebab-akibat atau hubungan kausal adalah hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain. Kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya.

2) Hubungan Saling Mempengaruhi (Fungsional)

Hubungan saling mempengaruhi adalah hubungan dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi.

Hubungan saling mempengaruhi disebut juga hubungan fungsional.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai *Modern Economic Growth*. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternative dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. (Syahputra, 2017: 183)

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. (Pambudi, 2013:1)

Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang- barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukannya. (Nurdiwaty,dkk, 2017: 49)

Pertumbuhan ekonomi menurut sirojuzilam, dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu daerah bisa dilihat dari nilai PDRB, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi daerah.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aglomerasi, investasi, angkatan kerja yang bekerja, dan *human capital investment*. Aglomerasi atau pola pemusatan, yang artinya terjadi pemusatan berbagai industry ke dalam suatu tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Angkatan kerja yang bekerja adalah penduduk berusia 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja dan yang sedang mencari kerja atau kegiatan lain. *Human Capital Investment* adalah pengaruh pendidikan formal yang di peroleh seseorang maka akan meningkatkan produktifikasi kerja orang tersebut juga. (Pambudi, 2013: 1-2)

Menurut sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PNB rill. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan hubungan diantara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori-teori tersebut diringkas sebagai berikut:

- 1) Teori Klasik: menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
- 2) Teori Schumpeter: menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
- 3) Teori Harrod-Domar: mewujudkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan
- 4) Teori Neo-Klasik: melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang dikemukakan oleh Smith terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang mempunyai arti penting bagi setiap masyarakat yaitu:

- 1) akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan dibidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan
  - 2) pertumbuhan jumlah penduduk dan yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja
  - 3) kemajuan teknologi yang secara luas, diterjemahkan sebagai cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (Nurdiwaty,dkk, 2017: 49)

menurut Arifin dan Gina indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB). Beberapa alasan digunakan PDB (bukan PNB) sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- 1) PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi
- 2) PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circulair flow concept*) yaitu perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam perhitungan PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya
- 3) Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik. (Syahputra, 2017: 185)

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

### a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan alat penting dan strategis untuk memperbaiki, memperbaharui, dan meningkatkan kinerja organisasi baik organisasi yang bergerak dalam kegiatan dunia usaha. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan

(*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*). (Murbeng, dkk: 1259)

Ife menyebutkan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*", demikian menurut Chambers (1995). Konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Friedman menegaskan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. (Nathanael, 2013:73)

Proses pemberdayaan masyarakat mendasarkan pada 4 prinsip yaitu:

- 1) Partisipatif adalah proses pemberdayaan harus dilakukan secara demokratis dengan semua stakeholders baik pemerintah, swasta, masyarakat termasuk masyarakat miskin itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek namun subjek dalam perencanaan pemberdayaan

- 2) Transparansi adalah adanya keterbukaan di antara stakeholders sehingga setiap tahapan akan direncanakan, mulai dilaksanakan sampai dengan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan
- 3) Akuntabilitas adalah perencanaan pemberdayaan nantinya dapat diimplementasikan dan tercapai tujuan serta sasarnya
- 4) Manfaat bersama adalah proses pemberdayaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada upaya pembangunan masyarakat sebagai kontribusi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat telah dijabarkan oleh Payne (dalam Adi, 2012) bahwa pemberdayaan masyarakat itu ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial. Selain itu makna pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memampukan individu atau komunitas. Dimana pemberian wewenang atau kekuasaan tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri. (Mustangin, dkk, 2017: 63)

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) seringkali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat

pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis. (Noor, 2011: 88)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu juga pranata-pranata sosialnya. (An-Nawawi, 2015: 94)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Disamping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis. Menurut prasojo permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya dan lain sebagainya. (Kurniawati, 2011: 11)

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya:

- 1) Peranan pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat

- 2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal
- 3) Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya
- 4) Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.
- 5) Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya
- 6) Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebaga proses *bottom-up*
- 7) Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta (Noor, 2011: 98)

Secara bertingkat keberdayaan masyarakat menurut Huraerah (2008, h.90) dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*)
- 2) Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan
- 3) Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya
- 4) Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- 5) Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam

mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan. (Murbeng, dkk: 1260)

Upaya dalam memberdayakan masyarakat dapat dikaji 3 (tiga) aspek:

- 1) *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
- 2) *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
- 3) *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. (Noor, 2011: 95)

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. (Kuncuro, 2003: 107)

Menurut Hall dan Midley kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi depresi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak atau kondisi dimana individu mengalami depresiasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. (Yulihardi, 2015: 148)

BPS dan Departemen Sosial yang dikutip Suharto mendefinisikan kemiskinan merupakan kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). (Yulihardi, 2015: 148)

Menurut ancok ada tiga hal pendekatan populer dalam memahami kemiskinan yaitu:

- a. Pendekatan *cultural* dengan konsep *cultural poverty* yang memandang kemiskinan sebagai suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama
- b. Pendekatan situasional yang dibidangi oleh Valentine (1968) yang mengasumsikan bahwa masyarakat miskin timbul karena adanya struktur total dari sistem sosial yang ada didalam masyarakat yang menekan mereka (kemiskinan struktural)
- c. Pendekatan interaksional dengan suatu asumsi bahwa sebagian orang miskin diakibatkan oleh warisan generasi sebelumnya dan sebagian yang lainnya hanya miskin secara priodik. (Yulihardi, 2015: 149)

Kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan rendah, bisa jadi tidak merasa miskin karena mereka merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena gaya hidup hedonis yang mereka jalani, atau lingkungan tidak sehar yang merek hadapi. Dalam hal ini meski kelihatannya mereka berkecukupan, namun apabila selalu merasa merasa kekurangan, mereka bisa dikatakan miskin. (Madjid, 2015: 115)

Penyebab kemiskinan menurut kuncoro (2000) sebagai berikut:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah
- c. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.  
(Madjid, 2015: 116)

Dalam penanggulangan kemiskinan memiliki strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik
- b. Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.  
(Madjid, 2015: 116)

#### 4. Pembangunan

Pembangunan secara etimologi berasal dari kata bangun yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan meliputi bentuk (*anatomis*), kehidupan (*fisiologis*) dan perilaku (*behavioral*). Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh satu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. (Murbeng, dkk: 1258)

Menurut Siagian pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan ekonomi dan perubahan yang dilakukan secara sadar

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*National Building*). (Kurniawati, 2011: 10)

Agus suryono berpendapat setidaknya terdapat lima persayaratan pembangunan, antara lain: Kemampuan, Kebersamaan, Kekuasaan, Ketahanan, serta Saling Ketergantungan. Sedangkan menurut Sumodiningrat peningkatan kesejahteraan umum masyarakat merupakan suatu inti dari sasaran pembangunan. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan lebih layak. (Kurniawati, 2011: 10)

Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun spiritual. Sumodiningrat mengungkapkan, peningkatan kesejahteraan umum masyarakat merupakan inti dari sasarn pembangunan. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil jika mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak. (Murbeng, dkk: 1259)

Leih lanjut sebagian juga menyebutkan bahwa pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran-peran tersebut adalah sebaga berikut:

- a. Peran selaku stabilisator
- b. Peran selaku innovator
- c. Peran selaku modernisator
- d. Peran selaku pelopor
- e. Peran selaku pelaksana sendiri (Murbeng, dkk: 1258)

Konsep pembangunan yang sudah banyak dijelaskan oleh Agus Suryono dan Trilaksono antara lain:

- a. Pertumbuhan (*growth*)
- b. Rekonstruksi (*reconstruction*)

- c. Modernisasi (*modernization*)
- d. Westernisasi (*westernization*)
- e. Perubahan sosial (*social change*)
- f. Pembebasan (*liberation*)
- g. Pembaruan (*innovation*)
- h. Pembangunan bangsa (*nation building*)
- i. Pembangunan-nasional (*national development*)
- j. Pembangunan (*development*) pengembangan dan pembinaan.  
(Murbeng, dkk: 1258)

Menurut Tjokroamidjojo administrasi pembangunan memiliki dua fungsi, yaitu perumusan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan lebih berorientasi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan negara yang belum maju. Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam administrasi bagi pembangunan adalah:

- a. Perencanaan
- b. Pengerahan Sumber Daya
- c. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat
- d. Koordinasi
- e. Pengawasan Evaluasi Pembangunan (Murbeng, dkk: 1258)

Pembangunan ekonomi suatu negara niscaya terjadi apabila tidak didukung pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan PDB (produk domestik bruto) perkapita membandingkannya dengan pertumbuhan penduduk melalui perbaikan struktur ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. (Noor, 2011: 91)

Dari berbagai kajian pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan para ahli ternyata pembangunan ekonomi Indonesia banyak menimbulkan ketimpangan baik ketimpangan sektoral, regional maupun

antara perkotaan dan perdesaaan. Berbagai ketimpangan tersebut akibat paradigma pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah lebih berpihak pada kelompok kecil masyarakat di perkotaan dan mengabaikan kelompok yang besar masyarakat yang berada di perdesaan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan yang mensejahterakan seluruh masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali mengubah paradigma pembangunan ekonomi Indonesia yang mengarah pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan dengan melibatkan kelompok marginal dan kelompok miskin yang berada di pedesaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sekaligus akan menekan arus urbanisasi. (Noor, 2011: 91)

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. (Noor, 2011: 90)

##### 5. Ekonomi Islam

Pengertian ekonomi islam, menurut Mohammad Nejatullah Shiddiq dari karyanya berjudul *Recent Work on History of Economic Thought in Islam Survey*, bahwa tidak terlepas dari pemikiran ekonomi islam yang telah berusia setua dengan islam itu sendiri. Sepanjang 14 abad silam sejarah islam telah menjelaskan penemuan studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan syari'ah. Sebagian besar diskursus ini hanya terkubur dalam literature tafsir al-qur'an, sarah hadits, dasar-dasar hukum, ushul fiqh, dan hukum fiqh. Belum terdapat usaha-usaha sitermatis untuk mengkaji lebih dalam lagi materi-materi itu agar menjadi aplikatif. Namun pernyataan ini sudah tidak relevan

lagi dengan kondisi sekarang dengan merebaknya dan munculnya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syari'ah. (Nainggolan, 2017: 50)

Ekonomi syariah atau ekonomi islam dibangun berlandaskan agama islam, karena aktivitas ekonomi sesuatu bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama islam. Sebagai derivasi dari instrumen islam, berbagai aspek dalam bentuk ekonomi akan mengikuti aturan syariah dalam berbagai aspeknya. Sebagai sistem kehidupan, aktivitas manusia tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadis, dimana islam menyediakan berbagai perangkat aturan yang sempurna bagi kebutuhan hidup manusia. (Aggraini, 2018: 298)

Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sistem ekonomi syariah tentu berbeda dengan sistem ekonomi *kapitalis* dan *sosialisme*, dimana ekonomi islam menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal terhadap para pekerjanya dan melarang menumpuk kekayaan tanpa ada manfaatnya. Selain itu, ekonomi islam memiliki dimensi ibadah yang ter aplikasi dalam tujuan syariah dan moral pada setiap kegiatan ekonomi.

Berikut beberapa definisi ekonomi islam menurut para pakar ekonomi islam, yaitu:

- a. Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam
- b. Metwally mendefinisikan ekonomi islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi, *Ijma* dan *Qiyas*. (Muklis, Suardi, 2020: 29)

Dalam ekonomi islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dengan sebaik mungkin, namun dibatasi peraturan atau yang disebut dengan prinsip syariah.

Sebagai ajaran yang komprehensif, hukum ekonomi islam dibangun atas dasar kaidah ushul fiqh, fiqh mu'amalah, qawa'id fiqh dan falsafah hukum islam yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan sumber hukum lainnya. Para ekonom muslim memahami ekonomi islam sebagai suatu teori yang dapat di praktikkan dalam setiap kegiatan ekonomi untuk menghindari segala transaksi yang mengandung unsur kebatilan, seperti *riba* (bunga), *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), *ikhtikar* (monopoli) dan lainnya. (Muklis, Suardi, 2020: 44)

Ekonomi islam di bangun atas dasar agama islam, karenanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam berbagai aspek dari agama islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi islam berdasarkan konsep dasar islam, yaitu *tauhid* Nabi SAW adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Budiantoro, 2018: 5)

Prinsip-prinsip yang menjad dasar dalam ekonomi islam, yakni:

- a. Hanya Allah SWT yang menentukan benar dan salah atau halal dan haram. Manusia tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan apa yang benar dan salah.

- b. Prinsip kegunaan atau kemanfaatan. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati seluruh ciptaan Allah SWT dengan sederhana dan tidak berlebihan.
- c. Prinsip kesederhanaan. Manusia di anjurkan untuk hidup sederhana dalam mengumpulkan harta benda dengan cara yang halal dan tidak tamak (gila harta).
- d. Prinsip kebebasan ekonomi. Manusia diberikan kebebasan dalam bidang konsumsi, produksi, distribusi, dll dengan cara yang halal akan tetapi islam tidak mengizinkan kebebasan yang tidak terbatas dalam ekonomi.
- e. Prinsip keadilan. Keadilan berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. (Budiantoro, 2018: 5)

Menurut M.M Metwally prinsip dasar dasar ekonomi syariah adalah:

- a. Dalam ekonomi islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia uang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin, tidak ada kemubaziran di dalamnya
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat atau faktor produksi. kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat atau faktor produksi. kepemilikan bersifat tidak mutlak, kepemilikan mutlak hanya oleh penciptanya. Pemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan merupakan titipan (amanah) Allah kepada manusia. Alat dan faktor produksi di tangan manusia hanya bersifat penguasaan dalam bentuk pemanfaatan dan pengaturan sesuai dengan syari'at islam
- c. Islam menolak (tidak membenarkan) pendapatan yang diperoleh secara tidak halal (bathil), seperti pencurian, penipuan, kecurangan, penyuapan, penjualan barang dan jasa yang haram, penggunaan kiat-kiat yang manipulatif, keuntungan yang

- berlebihan dengan cara-cara yang tidak terpuji, penimbunan barang dan penggunaan iklan mengelabui dan tidak wajar
- d. Pemilikan pribadi termasuk alat dan faktor produksi sebagai kapital yang mendorong peningkatan produksi nasional untuk kesejahteraan masyarakat. akumulai kapital yang terpusat pada segelintir orang yang tidak dibenarkan karena akan memperburuk distribusi pendapatan
  - e. Penggerak utama ekonomi islam adalah kerjasama dengan landasan ketauhidan, keikhlasan, kejujuran dan keadilan serta hanya mengharapakan keuntungan yang wajar
  - f. Prinsip pertanggungjawaban terhadap segala yang berkaitan dengan prilaku ekonomi baik semasih dalam kehidupan dunia maupun dakhirat nanti. Dengan keyakinan ini akan selalu memberikan inspirasi bagi pelaku ekonomi untuk tidak berbuat di luar ketentuan syari'at karena akan didapatkan ganjaran dan tidak terbatas dari pertentangan dari pertanggung jawaban nantinya. (Nainggolan, 2017: 54)

Prinsip ekonomi syariah juga masih dipertanyakan apakah menjadi solusi bagi masyarakat atau sebagai alternative atas keberadaan bank konvensional. Namun tidak dinafikan bahwa perkembangannya begitu pesat, walaupun masih terdapat persoalan-persoalan yang bakal mengganjal laju perkembangan ekonomi syariah, baik itu ditilik dari perspektif hukum maupun dari sisi ekonomi, sebagaimana hal ini digambarkan oleh Umar Chappra yang ditindak lanjuti oleh Syafii Antonio dalam kajian tazkia institute, persoalan-persoalan tersebut, yaitu:

- a. Pada umumnya produk-produk perbankan syariah (jasa-jasa yang ditawarkan) belum memiliki standar pengaturan yang baku dan seragam

- b. Dalam perkembangannya yang cukup pesat dewasa ini, namun tetap masih memiliki asset dan akses pasar yang masih kecil baru lebih satu persen dari total asset perbankan nasional, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha
- c. Dalam kondisi demikian, tentunya tingkat kemamuan bersaing dengan sitem konvensional belum berimbang, karena terbatasnya jaringan kantor dan lembaga penunjang lainnya yang juga belum memadai untuk keperluan likuiditas dan pengelolaan resiko
- d. Belum ada keseragaman dalam praktek-praktek akuntansi dan sistem auditing perbankan syariah, termasuk didalamnya keseragaman laporan keuangan sehingga otoritas pengatur maupun investos menghadapi kesulitan untuk melakukan perbandingan dalam menilai kinerja perbankan syariah
- e. Perlakuan oleh pengelola perbankan syariah di satu sisi dengan pihak mitra (nasabah) pada sisi lainnya belum berlangsung sesuai prinsip kesetaraan, masih seperti yang dipraktekkan dalam perbankan konvensional, dimana posisi pihak perbankan masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan para mitranya. Idealnya perbankan syariah memperlakukan nasabahnya sebagai mitra yang sejajar sehingga tidak terkesan hubungan kemitraan emosional karena hubungan keyakinan semata, melainkan juga harus rasional dan objektif. (Nainggolan, 2017: 60)

Karakteristik Ekonomi Islam, Yaitu:

- a. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat
- b. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing
- c. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia

- d. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih
- e. Melarang praktik penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga
- f. Melarang praktik asosiasi (mal-bisnis) (Muklis, Suardi, 2020: 47)

Ajaran islam dalam bidang ekonomi berkaitan dengan serangkaian masalah kesejahteraan yang luas: keadilan, belas kasihan, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan menekankan pada persaudaraan dan kesetaraan dan kesetaraan. Ini juga membahas masalah ekonomi murni seperti sistem pengambilan keputusan ekonomi, tabungan, investasi akumulasi modal, sistem insentif, peran yang tepat dari pemerintah, hak property, hukum waris, alokasi sumber daya, jenis kebebasan ekonomi manusia menikmati dan masalah-masalah ekonomi mendasar lainnya yang memiliki signifikansi yang mengakar dalam bagi umat manusia.

Singkatnya, ajaran moral islam menetapkan pedoman etis untuk kontrol efektif semua perilaku ekonomi. Institusi ekonomi harus memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran islam. Kegiatan dan usaha ekonomi dinilai dan diukur dalam istilah moral dan harus dilakukan sesuai dengan etos dan norma sistem nilai islam. Harus ada garis tindakan positif yang mengarah pada tujuan akhir kesejahteraan yang ditiadakan bijaksana dan marah dengan kebijaksanaan. Tata cara khusus, beberapa wajib dan lainnya melarang, berfungsi sebagai panduan untuk tindakan ekonomi. Adapun dasar-dasar ekonomi islam :

- a. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, tercapainya seluruh kebutuhan secara optimal sesuai dengan syariah, baik secara individu maupun masyarakat. pencapaian kebutuhan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan serta dapat melestarikan seluruh rezeki yang telah disediakan Allah SWT

- b. Hak milik relatif individu di akui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar, baik dan halal pula
- c. Dilarang menimbun harta benda, barang dagangan dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kesusahan bagi orang lain yang lebih membutuhkan dan menghambat laju perekonomian
- d. Pada harta orang kaya ada hak untuk orang miskin, maka dari itu ekonomi islam harus membagikan setengah hartanya untuk berzakat maupun bersedekah
- e. Dilarangnya riba (tambahan) dalam seluruh aspek ekonomi, baik perbankan maupun jual beli. (Aggraini, 2018: 302-303)

6. PNPM Mandiri

a. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri merupakan salah satu upayanya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah jalan.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimultan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah:

- 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan
- 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

b. Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan umum PNPM Mandiri perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diencanakan, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri.

Menurut departemen dalam negeri (2008) tujuan PNPM Mandiri secara umum adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan PNPM Mandiri secara khusus:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- 4) Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya badan kerja sama antar desa dalam pengelolaan pembangunan
- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

c. Jenis Kegiatan PNPM Mandiri

Terdapat beberapa jenis kegiatan yang ada di dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri, kegiatan tersebut adalah:

- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin
- 2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal)
- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan

dengan produk berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)

- 4) Penambahan pemodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)

d. Jenis Kegiatan yang Dilarang dalam PNPM Mandiri

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik
- 2) Pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
- 3) Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan ( pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain)
- 4) Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya
- 5) Pembiayaan gaji pegawai
- 6) Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja
- 7) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
- 8) Kegiatan apapun yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut
- 9) Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang
- 10) Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain
- 11) Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai

12) Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha

13) Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih 10.000 meter kubik

e. Ruang Lingkup PNPM Mandiri

Pada dasarnya kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat yang meliputi:

- 1) Penyediaan dan perbaikan pasaran atau lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya
- 2) Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi miskin. Perhatian yang lebih besar diperhatikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir
- 3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target
- 4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

f. Strategi PNPM Mandiri

PNPM Mandiri dalam menjalankan kegiatannya mempunyai beberapa strategi, diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan
- 2) Meningkatkan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan

- 3) Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana bantuan langsung masyarakat (BLM/*block grant*) dan bantuan pendampingan berupa *technical assistance*.

g. Cara Kerja PNPM Mandiri

PNPM Mandiri di nilai sebagai program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Program ini menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan desa, program ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat perdesaan, serta peningkatan kapasitas mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, penentuan jenis kegiatan, proses pelaksanaan, pengelola kegiatan dan dana. Upaya- upaya tersebut dilakukan melalui upaya tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan pemberdayaan informasi
- 2) Proses partisipatif pemetaan rumah tangga miskin (RTM) dan pemetaan sosial
- 3) Perencanaan tingkat dusun, desa dan kecamatan
- 4) Masyarakat melakukan kegiatan mereka
- 5) Akuntabilitas dan laporan perkembangan

h. Program PNPM Mandiri

1) Kategori Program

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.
- b) PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaanya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini ditingkat

komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

## 2) Komponen Program

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

### a) Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

### b) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

### c) Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam penyelenggaraan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokal karya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

d) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Dari penelusuran peneliti maka didapat beberapa penelitian relevan yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Eliyati dengan judul Upaya PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah program PNPM mandiri di desa Kebuyutan sudah dijalankan dengan baik. Program yang dijalankan meliputi penyaluran dana bergulir. Program penyaluran dana hanya sebagian kecil yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga miskin.
2. Ari Pratama dengan judul Skripsi Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM mandiri Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi, tingkat efektifitas pemberdayaan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengaruh pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM Mandiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM Mandiri efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dibuktikan dengan adanya pengurangan kemiskinan sebesar 75%. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM Mandiri berpengaruh positif terhadap pendapatan peserta sebelum dan sesudah mengikuti simpan pinjam kelompok perempuan UPK PNPM Mandiri.

3. Marlina Sinaga dengan judul Peranan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pengururan Kabupaten Samosir, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah peranan UPK PNPM Mandiri di Kecamatan Pengururan Kabupaten Samosir dikatakan baik. Dapat dilihat dengan peran UPK PNPM Mandiri yang menjalankan tugas dan fungsi dengan sesuai dengan standar alur prosedur.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan tentang upaya PNPM Mandiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Padang Luar Kecamatan Rambatan.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan yang beralamat di Jl. Tpi Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan. Penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung dari pelaksanaan observasi awal pada bulan September 2020. Berikut jadwal penelitian yang penulis jabarkan dalam bentuk tabel:

**Tabel 3.1  
Rancangan Waktu Penelitian**

No	Uraian	Tahun 2020				Tahun 2021						
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Observasi Awal	■										
2	Penyusunan Proposal	■	■	■								
3	Bimbingan Proposal			■	■							
4	Seminar Proposal			■	■	■	■	■				
5	Revisi Siap Seminar				■	■	■	■	■			
6	Pengumpulan Data							■	■	■		
7	Pengelolaan Data								■	■	■	
8	Bimbingan Skripsi									■	■	■
9	Sidang Munaqasah											■

#### C. Instrumen Penelitian

Instrument penting penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana penulis melakukan penelitian tersebut dengan dibantu dengan instrument

pendukung seperti berikut daftar wawancara, dokumentasi saat wawancara, *recorder* dan kamera.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan, Karyawan dan Masyarakat yang menerima pinjaman dari PNPM Mandiri serta yang dapat memberikan informasi tentang yang penulis teliti.

##### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang di dapat pada kantor PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

##### 1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai ketua, sekretaris dan bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yaitu Alfajri, Yonrizal Katik Muncak, Vivi Yuliani. Ketua dan dua anggota badan pengawas UPK rangkiang mandiri yaitunya Hasan Basri, LD. Datuak Paduko Basa dan Marjunis. Ketua dan dua anggota TPP (Tim Penyehat Pinjaman) yaitunya Afrimardoni, Mardini Fitri, dan Arminas. masyarakat yang menerima manfaat dari program PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan.

Dalam wawancara kepada masyarakat peneliti menggunakan teknik *sampling insidental*. *Sampling insidental* adalah teknik

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*insidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.(Sugiyono, 85: 2013)

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan di Desa Padang Luar dengan mengamati masyarakat yang menerima manfaat dari PNPM Mandiri

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi diambil dari kantor PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 244). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data biasanya dalam membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisiplinkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penilaian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah *triangulasi*. *Triangulasi* teknik dalam penelitian untuk menguji kredibilitas/ kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kemudian penulis melakukan proses *cross check* yaitu proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan**

##### **1. Sejarah PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan**

Tanggal 23 Mei 2006 rapat antara menko kesra, menko perekonomian, menteri keuangan dan kepala bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan program pengembangan kecamatan (PPK) dan program pengentasan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yang mulai *closing date* dalam pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu diintegrasikan dalam suatu wadah program nasional dan akan di-scale up ke seluruh desa dan kecamatan.

Pada rapat tersebut tercapai kesepakatan diantara menko dan menteri terkait, bahwa menko perekonomian yang pada saat itu dijabat oleh bapak boediono akan berkonsentrasi program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua K/L termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan.

Sidang kabinet tanggal 7 september 2006 khusus untuk penanggulangan kemiskinan, presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat. Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi penanggulangan kemiskinan, UKM dan Ketenaga Kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. pekerjaan umum bekerja keras menggarap konsep, nama dan desain awal program nasional pemberdayaan masyarakat ini dan sepakat mengajukan nama program sebagai “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)”.

Pada tanggal 12 September 2006 Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk menetapkan “Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrument dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pada 2007 PNPM Mandiri masuk ke tanah datar dengan mendirikan di 5 kecamatan termasuk salah satunya Kecamatan Rambatan. PNPM Mandiri merupakan wujud kesempurnaan dari PPK (Program Pengembangan Kecamatan), PNPM Mandiri mempunyai 2 kegiatan berupa kegiatan fisik seperti pengadaan prasarana untuk masyarakat dan Simpan Pinjaman Perempuan (SPP).

PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan awalnya tidak mempunyai tempat atau kantor tersendiri sehingga dulu sering menumpang di kantor kecamatan atau menyewa-nyewa tempat untuk kelangsungan proses kegiatan nya. Sekarang PNPM Mandiri telah mempunyai kantor sendiri yang lebih memudahkan dalam pekerjaan karyawan nya. (Wawancara dengan anggota TPPP Ibu Arminas)

## **2. Visi Misi**

Visi :

- a. Menjadikan UPK Rangkiang Mandiri sebagai lembaga keuangan mikro yang handal
- b. Untuk mewujudkan masyarakat Sejahtera, Partisipatif, dan Mandiri

Misi:

- a. Meningkatkan kemampuan UPK Rangkiang Mandiri dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat
- b. Mendorong peningkatan ekonomi rumah tangga anggota
- c. Menorong terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam kegiatan pembangunan partisipatif dan transparan
- d. Mendorong dan memotivasi pelestarian dan pengembangan aset secara berkelanjutan

- e. Terjalinya hubungan yang baik antara UPK, pelaku tingkat kecamatan dengan masyarakat
- f. Kerja sama yang kontraktif antara pelaku-pelaku program dalam pembangunan partisipatif.

### 3. Logo

**Gambar 4.1**  
**Logo PNPM Mandiri**



### 4. Bagian-bagian dari Organisasi

- a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
  - 1) Ketua : Alfajri
  - 2) Sekretaris : Yosrizal Katik Muncak
  - 3) Bendahara : Vivi Yuliani
- b. Badan Pengawas UPK
  - 1) Ketua : Hasan Basri
  - 2) Anggota : LD. Datuak Paduko Basa  
Marjunis
- c. Tim Penembangan Aset dan Penyehatan Pinjaman (TPPP)
  - 1) Ketua : Nofrial
  - 2) Anggota : Afri Mardoni  
Mardini Fitri  
Arminas

## 5. Pembagian Tugas

### a. Tugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

- 1) Mengkoordinisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, program kerja dan anggaran yang meliputi kegiatan usaha: keuangan, perguliran, kredit barang kebutuhan rumah tangga, peristiwa, jasa, pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, berbagai jenis tabungan masyarakat dan lain-lain yang menambah pendapatan yang tidak menyalahi aturan-aturan yang telah dibuat
- 2) Menjalin, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional UPK
- 4) Mengelola dana asuransi pinjaman
- 5) Mengelola rekening bank serta mencairkan dan menyalurkan dana kepada yang berhak
- 6) Pengarsipan dan pengelolaan data
- 7) Melakukan pembinaan kelembagaan dan usaha debitur serta mengembangkan akses kelompok (Informasi, Pasar, Teknologi dan Modal)
- 8) Menyampaikan laporan peertanggung jawaban realisasi rencana kerja dan anggaran secara tahunan pada forum MK/MAN

### b. Tugas Badan Pengawas UPK Rangkang Mandiri

- 1) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada UPK Kecamatan Rambatan sekurang kurangnya sekali sebulan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada kelembagaan lainnya sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun atau disesuaikan dengan kebutuhan

- 2) Melakukan pengawsan, pemeriksaan dan pembinaan kepada anggota dan kelompok yang pelaksanaannya diatur dalam Standar Oprasional dan Prosedur (SOP)
- 3) Badan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan tertulis hasil pemeriksaan kepada pengurus BPP Apm Kecamatan Rambatan selambat-lambatnya 1 bulan setelah selesai melakukan tugasnya
- 4) Ikut serta mengupayakan tercapainya visi misi kelembagaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat.

## **B. NARASUMBER**

Dari penelitian yang peneliti teliti terdapat beberapa orang yang menjadi narasumber untuk mendapatkan data yang falid dan sesuai dengan penelitian yang sedang dijalani peneliti, diantaranya yaitu:

1. Bapak Alfajri adalah ketua dari UPK PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan
2. Bapak Nofrial adalah ketua dari TPPP (Tim Pengembangan Aset dan Penyehatan Pinjaman) PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan
3. Ibu Arminas adalah Anggota dari TPPP (Tim Pengembangan Aset dan Penyehatan Pinjaman) PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan
4. Ibu nin adalah salah satu ketua SPP yang berada di Desa Padang Luar Kecamatan Rambatan
5. Ibu Bainar adalah warga yang menerima manfaat dari bantuan PNPM Mandiri dan merupakan anggota SPP yang ada di Desa Padang Luar Kecamatan Rambatan
6. Ibu Baiyanis adalah anggota SPP dan Warga yang menerima manfaat dari bantuan PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan
7. Ibu Eri adalah warga yang menerima manfaat dari adanya bantuan PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan
8. Ibu guru yang mengajar di TK Desa Padang Luar

9. Ibu Rena adalah warga Desa Padang Luar yang ikut merasakan manfaat adanya bantuan dari PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan
10. Ibu Perawati adalah warga yang merasakan manfaat bantuan yang diberikan oleh PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan

### C. HASIL PENELITIAN

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat PNPM Mandiri memiliki beberapa upaya yang dijalankan. Upaya- upaya tersebut sebagai berikut:

#### 1. Pembangunan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Desa Padang Luar

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. (Ningsi, 2011: 514)

Dalam wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak PNPM Mandiri kecamatan Rambatan. PNPM Mandiri kecamatan Rambatan telah membantu masyarakat Padang Luar dengan pembangunan salah satu pasar tradisional yang ada pada desa tersebut yaitu Pasar Bungo Ladan. (Wawancara dengan ketua UPK Bapak Alfajri)

**Gambar 4.2**  
**Pasar Bungo Ladan**



Bantuan program pembangunan dari PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dilakukan karena adanya permintaan dari masyarakat, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Adanya musyawarah masyarakat di nagari agar bisa memutuskan apa saja bantuan yang dibutuhkan untuk nagari
2. Setelah mengadakan musyawarah nagari akan diutus 6 orang ke kecamatan
3. Di kecamatan akan diadakan rapat dan memutuskan apa saja usulan dari nagari yang bisa dibantu oleh PNPM (Wawancara dengan ketua UPK Bapak Alfajri)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat masyarakat desa Padang Luar pernah dibantu oleh PNPM Mandiri dalam pembangunan pasar tradisonal dan dilakukan dengan sebaik mungkin agar terwujudnya pasar yang nyaman untuk masyarakat berjualan ataupun untuk berbelanja disana. Dalam pembangunan tersebut nanti akan dibentuk tim TPK (Tim Pengolah Kegiatan) yang akan mengawasi, merekrut pekerja dan PNPM Mandiri akan memonitor pembangunan tersebut hingga selesai agar pembangunan dilakukan dengan lancar. (Wawancara dengan ketua UPK Bapak Alfajri)

### **Gambar 4.3**

#### **Wawancara dengan Bapak Alfajri**



Dari wawancara kepada masyarakat desa Padang Luar didapatkan bahwa pasar Bungo Ladan bermanfaat bagi masyarakat terlebih bagi ibu-ibu yang harus berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Pasar tersebut memudahkan mereka karena jarak nya yang tidak jauh dari rumah masyarakat jadi tidak perlu berlama-lama untuk pergi berbelanja. Adapun bagi masyarakat yang ada mau menjual bisa dipasar tersebut dengan nyaman dan tidak jauh-jauh dari rumah agar tidak memakan biaya perjalanan dalam pengantaran barang jualan.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Binar dengan adanya pasar Bungo Ladan dia bisa membeli kebutuhan untuk beberapa hari kedepannya dan jika beli di pasar setidaknya lebih banyak bahan yang didapatkan daripada membeli di warung. (wawancara dengan ibu Binar)

#### **Gambar 4.4**

#### **Wawancara dengan Ibu Binar**



Bukan itu saja adanya pasar Bungo Ladan juga bermanfaat bagi penjual seperti salah satu warga Desa Padang Luar buk eri yang mengatakan pasar itu nyaman untuk berjualan karna adanya atap yang langsung bisa untuk berteduh dan jarak yang tidak terlalu jauh juga memudahkan dalam pemindahan barang dari rumah ke pasar. (Wawancara dengan ibu Eri)

**Gambar 4.5**  
**Wawancara dengan Ibu Eri**



2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Desa Padang Luar

Dalam program PNPM Mandiri adanya pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat. PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan juga telah mengupayakan sebaik mungkin untuk membantu masyarakat desa Padang Luar dan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat tersebut dengan adanya bantuan dalam pengadaan tempat dan alat posyandu bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dan adanya bantuan alat-alat untuk belajar pada sebuah TK di padang luar.

Proses dalam pengajuan permintaan untuk kesehatan dan pendidikan ini sama dengan pembangunan yaitu dengan adanya musyawarah dari nagari lalu akan ada utusan dari nagari untuk musyawarah di kecamatan yang akan menentukan apasaja permintaan nagari ini yang bisa disanggupi oleh PNPM Mandiri. (wawancara dengan bapak Alfajri)

Dalam proses untuk tempat dan alat posyandu dan alat-alat belajar di sekolah TK, masing- masing dari program ini memiliki TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tersendiri sehingga nya TPK ini yang akan mengajukan permintaan tersebut hingga permintaan disetujui dan sampai proses sampai nya alat- alat yang akan membantu dalam

posyandu dan untuk belajar di TK. TPK wajib melaporkan setiap hal nya kepada PNPM Mandiri agar tidak terjadi masalah dan kecurangan dana untuk bantuan tersebut. (Wawancara dengan ketua UPK Bapak Alfajri)

**Gambar 4.6**

**Alat- alat belajar TK**



**Gambar 4.7**

**Alat- alat bermain TK**



Pada gambar 4.6 dan gambar 4.7 terlihat bahwa PNPM Mandiri telah membantu masyarakat desa Padang Luar dalam menyediakan alat-alat belajar dan alat-alat bermain bagi anak-anak TK di salah satu desa Padang Luar. Bantuan alat-alat belajar dan alat-alat

bermain tersebut membantu dalam proses pendidikan anak-anak yang akan membantu dalam perkembangan anak pada desa Padang Luar.

Seperti yang disebutkan oleh salah satu warga desa Padang Luar yang terbantu dengan adanya bantuan alat belajar dan bermain untuk anak-anak TK. Dengan adanya bantuan tersebut anak-anak bisa belajar dengan lebih baik dan lancar. (Wawancara dengan ibu perawati)

#### **Gambar 4.8**

#### **Wawancara dengan Ibu Perawati**



Bukan hanya dari masyarakat terbantu namun guru yang mengajar di TK tersebut juga terbantu seperti yang dijelaskan oleh salah satu guru yang mengajar menyebutkan bahwa alat-alat belajar dan alat-alat bermain ini berguna dalam kelangsungan proses mengajar kepada murid- murid nya. Alat-alat bermain juga membantu agar anak-anak tidak bermain keluar dari area TK tersebut. (Wawancara dengan ibu guru TK)

**Gambar 4.9**  
**Wawancara dengan Ibu Guru TK**



Kesehatan sangat diperlukan bagi masyarakat kaena itu PNPM Mandiri telah mengupayakan untuk memberi pelayanan kesehatan dengan mendirikan tempat dan memberi alat-alat posyandu bagi masyarakat desa Padang Luar. Posyandu sangat penting bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan.

**Gambar 4.10**  
**Posyandu**



Dari segi masyarakat sangat terbantu dengan adanya pengadaan alat- alat untuk posyandu anak tersebut. Karena dari sebelumnya masyarakat kurang dana dan kekurangan alat-alat untuk

melakukan rutinitas posyandu dalam mengimmunisasi kan anak mereka, dengan adanya alat tersebut lebih bisa membantu lancar nya proses imunisasi ataupun proses posyandu pada anak-anak. (Wawancara dengan ibu Rena)

**Gambar 4.11**

**Wawancara dengan Ibu Rena**



3. Peningkatan Kapasitas Keterampilan Kelompok Usaha dalam Meningkatkan Perekonomian

Pemberdayaan masyarakat dapat difenisikan sebagai suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, melalui berbagai metode seperti bantuan teknis, usaha mandiri, dan konflik. Kelompok usaha bersama adalah salah satu media yang menciptakan untuk membangun kemampuan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi diri masyarakat miskin dengan dimensi sosial-ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan kelompok usaha bersama. (Nugrahaningsih, 2016: 181-182)

Salah satu program yang membantu masyarakat dalam peningkatn ekonomi yaitunya dengan adanya keterampilan kelompok usaha yang akan mengajarkan masyarakat bagaimana usaha yang dirilis ataupun yang akan dirilis masyarakat berjalan dengan lancar dan masyarakat mengerti tentang usaha yang dikelola nya.

Dalam peningkatan kapasitas kelompok usaha ini PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan tidak ada melakukan program ini, menurut karyawan PNPM Mandiri kemungkinan keterampilan kelompok usaha ini dilakukan oleh kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di masyarakat. (wawancara dengan bapak Nofrial)

**Gambar 4.12**

**Wawancara dengan Bapak Nofrial**



Keterampilan kelompok usaha di kelompok SPP desa padang luar tidak ada, dari wawancara yang ditanyakan ke ketua SPP tidak ada mereka melakukan keterampilan kelompok usaha. Masyarakat banyak yang melanjutkan usaha sendiri-sendiri atau lebih mengembangkan usaha nya masing-masing. (Wawancara dengan ibu Nin)

**Gambar 4.13**

**Wawancara dengan Ibu Nin**



#### 4. Penyaluran Dana Pinjaman Masyarakat Padang Luar

Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan kementerian Negara/ Lembaga. Dana bergulir disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat (*revolving fund*) bergulir/ berputar mengandung dua makna, yaitu:

- a. Dana tersebut harus selalu berputar (tidak berhenti) dalam aktivitas individu atau kelompok yang dapat memanfaatkan melalui kegiatan yang bersifat produktif
- b. Pengertian yang lebih luas dana tersebut harus selalu berputar untuk dapat dimanfaatkan secara bergulir dari individu atau kelompok yang lain. (Yulihardi, 2015: 151)

Penyaluran dana pinjaman adalah salah satu program PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan. Penyaluran dana pinjaman dilakukan oleh SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di setiap desa yang akan meminjam dana ke PNPM Mandiri. Penyaluran dana bertujuan agar tidak adanya rentenir yang berkeliaran di tengah masyarakat yang akan menimbulkan permasalahan dari segi ekonomi bagi masyarakat nantinya. (Wawancara dengan ketua UPK Bapak Alfajri)

Dalam menerima pinjaman dana kelompok SPP harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kegiatan simpan pinjam
- b. Mempunyai aturan pengelolaan dana simpanan dan pinjaman
- c. Kegiatan simpan pinjam masih berlangsung baik
- d. Mempunyai organisasi (pengurus) dan administrasi

Adapun proses penyaluran dana PNPM Mandiri sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan
- b. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam peraturan Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan
- c. Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN
- d. Besaran dana dari APBD disalurkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi, atau biaya lainnya.

Penyaluran dana pinjaman ke masyarakat dari PNPM Mandiri dilakukan setelah ketua SPP mengajukan proposal ke PNPM Mandiri yang nantinya akan dilihat kelayakan SPP dalam menerima dana yang akan disalurkan dari PNPM Mandiri. SPP yang layak mendapatkan dana akan di berikan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) oleh PNPM Mandiri. Jadwal dalam penembalian dana dari SPP ke PNPM Mandiri dari tanggal 1-5 setiap bulannya. Proposal boleh diajukan lagi setelah kelompok SPP telah melunasi angsuran yang ke 8. (Wawancara dengan ketua UPK Bapak Alfajri)

Dalam mengatasi jika adanya kemacetan dana nantinya didalam proposal yang diajukan oleh kelompok SPP dibuatkan bahwa jika ada masalah anggota kelompok siap menanggulangi masalah dari anggota tersebut. Dalam keterlambatan pengembalian angsuran tidak ada denda yang diberikan oleh PNPM Mandiri tetapi jika ada kelompok yang mengembalikan dengan tepat waktu maka PNPM

Mandiri akan memberikan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) sebanyak 2% dari total pinjaman. IPTW ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kelompok agar selalu tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman. Jumlah pinjaman kelompok biasa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan kelompok tersebut, dalam kurun waktu tahun terakhir ini adanya kenaikan pinjaman dari kelompok SPP ke PNPM Mandiri. (Wawancara dengan ketua UPK Bapak Alfajri)

Bagi masyarakat pinjaman dana dari PNPM Mandiri berguna untuk membantu dalam perkembangan usahanya. Masyarakat menggunakan dana tersebut dengan profesi atau pekerjaan mereka, seperti yang berjualan buka kedai maka dana tersebut digunakan untuk modal dalam penjualan tersebut, bagi petani dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sawah seperti untuk pembelian pupuk sawah mereka. Walau demikian dalam proses pengembalian dana setiap bulannya ke PNPM Mandiri sering mengalami keterlambatan karena faktor ekonomi. (Wawancara dengan ibu Nin)

Juga dikatakan oleh ibu Baiyanis salah satu anggota SPP bahwa pinjaman dana yang dia dapatkan digunakan untuk kebutuhan atau keperluan sawah seperti membeli pupuk untuk sawah. (Wawancara dengan Ibu Baiyanis)

**Gambar 4.14**  
**Wawancara dengan Ibu Baiyanis**



## D. PEMBAHASAN

### 1. Pembangunan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Desa Padang Luar

Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*National Building*). (Kurniawati, 2011: 10)

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terdapat bantuan pembangunan dari PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan yang telah dilakukan di Desa Padang Luar yaitu pasar tradisional Bungo Ladan. Dari pembangunan pasar tradisional tersebut terdapat manfaat bagi roda perekonomian masyarakat yang pekerjaannya pedagang.

Menurut saya pembangunan pasar tradisional yang telah dibantu PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan telah membantu masyarakat yang berprofesi pedagang karena para pedagang bisa berjualan dengan nyaman di pasar tersebut. Karena yang dibangun sebuah pasar tradisional maka pasar tersebut menjadi pusat belanjanya bagi masyarakat terlebih bagi ibu-ibu yang ingin membeli perlengkapan bahan-bahan dapur nya.

### 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Desa Padang Luar

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bidang pelayanan kesehatan masyarakat merupakan bidang pelayanan yang kerap menggunakan pendekatan pemberdayaan dalam berbagai programnya. Penggunaan ini dinilai tepat bilamana pemberdayaan sebagai landasan program menunjukkan ketiga aspek pada pihak yang diberdayakan (klien) yaitu keterlibatan klien dalam membangun akal, (Julismin, 2013: 125)

Dari hasil penelitian terlihat bahwa PNPM Mandiri telah membantu masyarakat Desa Padang Luar dalam pelayanan kesehatan dengan pengadaan tempat dan pemberian alat-alat posyandu.

Menurut saya pengadaan tempat dan pemberian alat-alat perlengkapan untuk posyandu ini membantu masyarakat yang mempunyai bayi atau balita untuk membantu imunisasi agar pertumbuhan anak-anak tersebut bisa lebih baik. Walau demikian posyandu hanya terkhusus bagi anak-anak balita ataupun bagi ibu-ibu hamil sehingga tidak semua bisa merasakan pelayanan kesehatan tersebut.

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. (Nurkholis, 2013: 25)

Dari hasil penelitian terdapat PNPM Mandiri telah membantu masyarakat dengan memberi bantuan berupa memberi alat-alat belajar dan bermain bagi TK di salah satu Desa Padang Luar.

Menurut saya bantuan alat-alat belajar dan bermain ini membantu dalam proses belajar mengajar pada TK tersebut sehingga anak-anak yang bersekolah di TK bisa belajar dengan nyaman begitu pula dengan guru di TK terbantu agar proses mengajar menjadi lebih baik. Dengan adanya pendidikan yang nyaman bisa membantu individu masyarakat menjadi berkembang ke yang lebih baik.

### 3. Peningkatan Kapasitas Keterampilan Kelompok Usaha dalam Meingkatkan Perekonomian

Kelompok usaha bersama adalah salah satu media yang menciptakan untuk membangun kemampuan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi diri masyarakat

miskin dengan dimensi sosial-ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan kelompok usaha bersama. (Nugrahaningsih, 2016: 181-182)

Dari hasil penelitian dikatakan bahwa tidak adanya keterampilan kelompok usaha di Desa Padang Luar dan dari PNPM Mandiri juga tidak ada pembentukan kelompok usaha bagi masyarakat Desa Padang Luar.

Menurut saya kelompok usaha ini sangat berguna dalam peningkatan ekonomi. Karena tidak adanya keterampilan kelompok usaha yang dibentuk PNPM Mandiri pada masyarakat Desa Padang Luar memperlihatkan bahwa belum maksimalnya upaya PNPM Mandiri Kecamatan Rambatan dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.

#### 4. Penyaluran Dana Pinjaman Masyarakat Padang Luar

Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah. ( Hidayat, 2012: 109)

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan penulis terdapat penyaluran dana dari PNPM Mandiri ke masyarakat Desa Padang Luar. Penyaluran dana dilakukan melalui UPK PNPM Mandiri lalu disalurkan melalui ketua SPP di masing-masing desa.

Menurut saya penyaluran dana yang telah dilakukan PNPM Mandiri ini cukup bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan modal dalam usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat tersebut. Namun dari wawancara yang telah dilakukan masih seringnya masyarakat yang telat ketika melakukan pengembalian pinjaman setiap bulannya. Walaupun tidak adanya bunga saat masyarakat telat melakukan pembayaran tetap ini tidak terlalu efektif dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap upaya PNPM Mandiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat padang luar, maka didapat dari beberapa program upaya PNPM Mandiri yaitu:

1. Pembangunan/sarana prasana untuk masyarakat padang luar yang berupa pasar bungo ladan yang berada di padang luar dengan adanya pasar tersebut masyarakat lebih mudah atau dekat dalam berbelanja bahan makanan dan bagi yang berjualan juga menjadi dekat dan aman disana.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat padang luar. Dalam kesehatan PNPM Mandiri membantu dalam pengadaan alat-alat posyandu yang berguna untuk kelancaran acara posyandu anak. Sedangkan untuk pendidikan PNPM Mandiri membantu alat belajar di TK sehingga nya proses belajar mengajar anak menjadi lancar.
3. Peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha, dalam hal ini tidak adanya keterampilan tersebut baik dari PNPM Mandiri ke masyarakat ataupun kelompok SPP yang ada di masyarakat juga tidak mengadakan keterampilan kelompok usaha ini.
4. Penyaluran dana pinjaman ke masyarakat berjalan lancar ke masyarakat. dari penyaluran dana pinjaman ini masyarakat terbantu untuk modal usaha atau membantu usaha masyarakat yang sudah jalan. Bagi masyarakat petani pun penyaluran dana ini berguna untuk pembelian kebutuhan sawah yang sedang digarapnya.

**B. Implikasi**

Upaya PNPM Mandiri dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Padang Luar yang terlaksana, yaitunya: pembangunan/sarana prasarana dengan membangun pasar Bungo Ladan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan pengadaan tempat dan pemberian alat-alat posyandu sedangkan untuk pelayanan pendidikan adanya bantuan alat-alat belajar dan bermain di salah satu TK, yang terakhir penyaluran dana pinjaman ke masyarakat.

Dari upaya yang telah dilakukan tidak terlalu efektif dalam peningkatan ekonomi masyarakat. sedangkan program peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha yang kemungkinan efektif dalam peningkatan ekonomi dan pengembangan usaha masyarakat tidak terlaksana. Dari hal ini diharapkan PNPM Mandiri lebih bisa melihat hal yang penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

**C. Saran**

Dalam menjalankan upaya PNPM Mandiri dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Padang Luar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyarankan kepada PNPM Mandiri lebih melihat kondisi masyarakat agar perekonomian pada masyarakat lebih menjadi lebih baik dan meningkat dan bagi masyarakat supaya lebih mengerti tentang peran PNPM Mandiri agar mendapat informasi yang akurat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Haris, 2018, Jurnal Publikasi, Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
- Asrawi Madjid, 2015, Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Kotamobagu, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15 No.04
- Basaria Nainggolan, 2017, Penyelenggaraan Ekonomi Syariah Dalam Tantangan, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 3, No. 1
- Bupati Tanah Datar, 2019, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD)
- Diah Nurdiwaty, dkk, 2017, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain- lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17, No.1
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.4
- Eliyati, 2012, Skripsi, Upaya PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah
- Eko Wicaksono Pambudi, 2013, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor yang Mempengaruhi(Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah), Diponegoro Journal Of Economics, Vol.2, No2
- Gatot Hidayat, 2012, Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada BRI Unit Manda, Jurnal Akuntansi&Keuangan, Vol.3, No.1
- Jimmy Hasoloan, 2010, F Ilmu Ekonomi (PEI), yogyakarta: Deepublish

- Julismin, 2013, Gambaran Pelayanan dan Perilaku Kesehatan di Indonesia, Jurnal Geografi, Vol.5, No.1
- Lidya Nugrahaningsih, 2016, Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.40, No.2
- Muhammad Dinar&Muhammad Hasan, 2018, Pengantar ekonomi: Teori dan Aplikasi, Penerbit: CV. Nur lina
- Muklis, Didi Suardi, 2020, Pengantar Ekonomi Islam, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Munawar Noor, 2011, Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.1, No.2
- Mustangin, dkk, 2017, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No. 1
- Nathanael, 2013, Partispasi Masyarakat Pada PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Jurnal Paradigma, Vol.2, No.1
- Nurkholis, 2013, Pendidikan Dalam Memajukan Teknologi, Jurnal Kependidikan, Vol.1 No.1
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, [www.pnpm-mandiri.org](http://www.pnpm-mandiri.org), diakses pada tanggal 13 Nov 2020
- Rachmasari Anggraini, Maqasid Al-Shari'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.9 No.2
- Rinaldi Syahputra, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1 No.2
- Risandra Alirastra Budiantoro, 2018, Sistem Ekonomi (islam) dan Pelanggaran Riba dalam Perspektif Historis, Jurnal Ilmiah Ekonomi islam, Vol.4, No.1
- Siaga Basu Murbeng, dkk, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No. 5

- Sri Ayu Ningsi, 2011, Implikasi Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaaan Terhadap Ketersediaan Infrastruktur di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2, No.8
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta,CV
- Yulihardi, 2015, Analisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal Economic and Education, Vol.3, No.2